

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kerjasama Indonesia-Australia dalam *Red Meat and Cattle Partnership* fase kedua pada 2019-2024 merupakan bentuk kerjasama yang terlembaga, multidimensional, dan melibatkan aktor negara maupun non-negara. Kerjasama tersebut tidak hanya dilaksanakan melalui perdagangan sapi hidup dan produk daging sapi, tetapi juga mencakup transfer teknologi, bantuan teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan investasi, penguatan rantai pasok, inovasi, serta komunikasi antara pemerintah dan pelaku industri dari kedua negara. RMCP fase kedua menunjukkan perkembangan hubungan Indonesia-Australia dari pola yang semula lebih berorientasi pada transaksi perdagangan menuju kemitraan sektoral yang berupaya membangun kapasitas dalam jangka panjang.

Kerjasama tersebut dilatar belakangi karena adanya permasalahan struktural yang masih dihadapi pada sektor daging sapi Indonesia. Produksi Indonesia masih bertumpu pada peternakan rakyat berskala kecil yang memiliki keterbatasan modal, lahan, pakan, teknologi, pengetahuan manajerial, dan akses pasar. Panjangnya siklus reproduksi, lemahnya usaha pembibitan, rendahnya efisiensi rantai pasok, tingginya biaya distribusi, keterbatasan infrastruktur, ketidakstabilan harga, serta ancaman penyakit hewan menyebabkan produksi domestik belum mampu berkembang sesuai dengan peningkatan kebutuhan nasional. kondisi tersebut mendorong Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan Australia yang memiliki keunggulan dalam kapasitas produksi sapi, teknologi peternakan, sistem kesehatan hewan, pengalaman industri, serta kedekatan geografis dengan Indonesia.

Dalam bidang perdagangan, RMCP fase kedua mempertahankan hubungan antara industri sapi Australia dan rantai pasok daging sapi Indonesia. Perdagangan sapi hidup, khususnya sapi bakalan, memberikan bahan baku yang berguna bagi kegiatan penggemukan, pemotongan, dan distribusi yang dilakukan pelaku usaha di Indonesia. Selain itu, impor daging sapi kotak dan produk jeroan membantu

melengkapi kebutuhan industri pengolahan, hotel, restoran, catering, pasar modern, dan rumah tangga. Perkembangan perdagangan selama 2019-2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Volume perdagangan mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19 dan ketika harga sapi Australia meningkat, tetapi mulai pulih pada 2023 dan menguat pada 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa perdagangan bilateral tetap menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga ketersediaan pasok, meskipun masih rentan terhadap perubahan harga, nilai tukar, siklus populasi sapi Australia, gangguan logistik, kebijakan perizinan, serta penyakit hewan.

Meskipun kegiatan ekspor impor dapat membantu memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek dan menengah, perdagangan belum secara langsung menyelesaikan persoalan produksi domestik. Impor sapi bakalan memang menciptakan nilai tambah melalui kegiatan penggemukan dan pemotongan di Indonesia, tetapi ketergantungan yang terlalu besar terhadap pasokan eksternal dapat menyebabkan kerentanan rantai pasok nasional. manfaat perdagangan dalam RMCP akan menjadi lebih besar apabila dihubungkan dengan pengembangan pembibitan, peningkatan produktivitas peternak rakyat, investasi pada infrastruktur, dan penguatan industri pengolahan di dalam negeri.

Dalam bidang transfer teknologi, RMCP fase kedua memperkenalkan dan mengembangkan berbagai model produksi yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor peternakan Indonesia. Transfer teknologi tersebut dilaksanakan melalui IACCB, SISKAs, *Investment Decision Support Toolkit* dan dukungan terhadap Program Korporasi Desa Sapi. Teknologi yang ditransfer tidak hanya berbentuk perangkat digital atau otomatisasi, tetapi juga mencakup teknologi tepat guna dalam bidang pembibitan, pakan, kesehatan hewan, fasilitas kelahiran, pengelolaan limbah, pencatatan produksi, dan manajemen usaha.

Pelaksanaan Program Korporasi Desa Sapi memperlihatkan bahwa teknologi sederhana yang sesuai dengan kondisi peternak dapat menghasilkan perubahan konkret. Perbaikan kandang, pakan, pelayanan kesehatan, dan prosedur pemeliharaan berhasil menurunkan angka kematian dan pedet pada lokasi pelaksanaan program. Sementara itu, model integrasi sapi dan perkebunan kelapa sawit melalui SISKAs menunjukkan potensi pemanfaatan lahan dan hasil samping

perkebunan untuk mendukung usaha pembibitan. temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan transfer teknologi tidak hanya ditentukan dengan adanya tingkat kecanggihan teknologi, tetapi juga kesesuaiannya dengan sumber daya lokal, kemampuan pengguna, kelayakan usaha, dan dukungan kelembagaan.

Dalam bidang bantuan teknis, RMCP fase kedua berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan individu dan lembaga yang terlibat dalam industri sapi Indonesia. Bantuan tersebut dilaksanakan melalui pelatihan, magang, sekolah lapangan, pendampingan kelompok, sertifikasi profesi, konsultasi tenaga ahli, dan pengembangan lembaga pelatihan. Proyek SDP telah memberikan pelatihan kepada 1.450 peserta Indonesia, sedangkan Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Mataram telah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam merancang, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelatihan secara mandiri. Hasil tersebut menunjukkan bahwa bantuan teknis RMCP tidak hanya meningkatkan kemampuan peserta secara individual, tetapi juga berusaha membangun kapasitas kelembagaan yang dapat memberikan efek pengganda.

Bantuan teknis dalam bidang kesehatan hewan, biosekuriti, nekropsi, dan kesejahteraan ternak juga memperlihatkan adanya kepentingan timbal balik. Indonesia mendapat peningkatan kemampuan dalam mendeteksi, mencegah, dan merespon penyakit yang dapat menurunkan produktivitas ternak. Pada sisi lain, Australia menerima manfaat dari terbentuknya lingkungan perdagangan yang lebih aman dari resiko penyebaran penyakit lintas batas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerjasama kesehatan hewan tidak hanya berkaitan dengan bantuan dari satu negara kepada negara lain, tetapi juga menjadi kepentingan bersama untuk menjaga keberlanjutan perdagangan dan rantai pasok bilateral.

Jika dianalisis menggunakan pemikiran William J. Long, RMCP fase kedua memperlihatkan bahwa perdagangan, transfer teknologi, dan bantuan teknis dapat membentuk suatu paket insentif ekonomi yang mendorong keberlanjutan kerjasama bilateral. Indonesia menerima pasokan komoditas, pengetahuan, teknologi, pelatihan, dan peluang investasi. Australia mendapat akses terhadap pasar Indonesia serta keberlanjutan hubungan dengan industri sapi dan daging sapi

nasional. manfaat tersebut juga diterima aktor domestik, seperti importir, perusahaan penggemukan, rumah potong hewan, perguruan tinggi, dokter hewan, asosiasi industri, investor, dan kelompok peternak. Keterlibatan aktor-aktor tersebut membantu membentuk dukungan terhadap keberlanjutan hubungan kerjasama kedua negara.

Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian RMCP fase kedua lebih kuat pada tingkat kelembagaan, peningkatan kapasitas, pengembangan model, dan hasil pada lokasi program dibandingkan pada tingkat perubahan struktural secara nasional. produksi daging sapi Indonesia memang meningkat dari 504.802 ton pada 2019 menjadi 585.904 ton pada 2024. Akan tetapi, kebutuhan nasional pada 2024 yang mencapai 759.767 ton menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang tinggi antara produksi dengan permintaan. Peningkatan produksi tersebut juga tidak dapat sepenuhnya dikaitkan secara langsung dengan RMCP karena dipengaruhi oleh berbagai kebijakan nasional, kondisi pasar, perubahan populasi ternak, pemulihan pasca pandemi, dan faktor-faktor lainnya.

Secara keseluruhan, kerjasama Indonesia-Australia dalam RMCP fase kedua dapat dinilai telah memperkuat hubungan bilateral dan menghasilkan fondasi penting bagi pengembangan industri sapi dan daging sapi Indonesia. Kerjasama ini berhasil memperluas hubungan dari perdagangan menuju transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia, kesehatan hewan, investasi, dan penguatan kelembagaan. Meskipun demikian, RMCP belum sepenuhnya mengatasi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan daging sapi nasional. Keberhasilan jangka panjangnya bergantung pada kemampuan Indonesia memperluas hasil proyek, mengintegrasikan pembelajaran RMCP ke dalam kebijakan nasional, menyediakan pembiayaan lanjutan, dan memastikan bahwa manfaat kerjasama dapat diterapkan secara berkelanjutan oleh peternak rakyat dan lembaga domestik.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan untuk mendukung keberlanjutan hasil kerjasama Indonesia-Australia pada sektor sapi dan daging sapi. Pertama, Pemerintah Indonesia perlu mengintegrasikan model, pengetahuan, dan kapasitas yang telah dihasilkan RMCP

ke dalam program pembangunan peternakan nasional dan daerah. Program yang menunjukkan hasil positif, seperti Korporasi Desa Sapi, SISKAs, pelatihan kesehatan hewan, dan penguatan lembaga pelatihan perlu dilanjutkan melalui dukungan anggaran nasional dan daerah. Keberlanjutan program tidak seharusnya bergantung sepenuhnya pada pendanaan Australia. Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan sumber pembiayaan, tenaga pendamping, kelembagaan pelaksana, dan pembagian kewenangan yang jelas setelah berakhirnya RMCP.

Kedua, Indonesia dan Australia perlu membentuk mekanisme lanjutan untuk mempertahankan komunikasi dan koordinasi yang telah dibangun melalui RMCP. Mekanisme tersebut dapat berbentuk kemitraan baru, forum pemerintah dan industri, kelompok kerja teknis, atau integrasi program ke dalam kerangka IA-CEPA. Mekanisme lanjutan perlu dilengkapi dengan target yang terukur, pembagian tanggung jawab, jadwal evaluasi, serta publikasi hasil program secara berkala. Indikator keberhasilan program sebaiknya tidak hanya menggunakan jumlah pelatihan, peserta, studi, atau perangkat yang dihasilkan, tetapi juga mengukur tingkat adopsi teknologi, angka kelahiran dan kematian ternak, penambahan bobot badan, efisiensi pakan, pendapatan ternak, keberlanjutan kelembagaan, dan kontribusi terhadap pengurangan kesenjangan pasokan nasional.

Ketiga, perluasan transfer teknologi dilakukan secara selektif berdasarkan kondisi setiap wilayah. Model SISKAs sebaiknya diterapkan pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan, dukungan perusahaan perkebunan, tenaga manajerial, ketersediaan air, dan pola pembagian manfaat yang jelas. Hubungan inti-plasma harus dirancang secara transparan agar peternak tidak hanya menjadi penyedia tenaga kerja, tetapi juga mendapatkan akses terhadap teknologi, modal, pasar, dan pembagian keuntungan yang adil. Teknologi digital juga perlu dibuat sederhana, terjangkau, dan memberikan manfaat langsung, misalnya melalui keterhubungan dengan akses kredit, asuransi ternak, pelayanan kesehatan, pencatatan pembibitan, dan informasi pasar.

Keempat, bantuan teknis perlu lebih diarahkan kepada peternak rakyat melalui pendampingan yang bersifat berulang, jangka panjang, dan berbasis praktik. Pelatihan satu kali belum cukup untuk mengubah pola produksi apabila peternak

masih menghadapi keterbatasan modal, pakan, lahan, dan fasilitas. Pelatihan perlu disertai penyediaan akses, pembiayaan, pengembangan pakan lokal, pelayanan veteriner, fasilitas penanganan ternak, serta penguatan korporasi peternak. Materi pelatihan juga harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan, bahasa, sumber daya, serta permasalahan yang dihadapi peternak pada masing-masing wilayah.

Kelima, kebijakan perdagangan perlu menyeimbangkan kebutuhan menjaga ketersediaan pasokan dengan kepentingan memperkuat produksi domestik. Impor sapi bakalan dan daging sapi sebaiknya dilakukan secara terukur berdasarkan kebutuhan dan kemampuan produksi dalam negeri. Pemerintah juga perlu memberikan kepastian mengenai perizinan, kuota, karantina, sertifikasi halal, dan persyaratan teknis agar pelaku usaha dapat melakukan perencanaan secara lebih baik.

Keenam, kerjasama kesehatan hewan dan biosekuriti perlu diperhatikan sebagai prioritas bilateral. Indonesia dan Australia perlu memperkuat pertukaran informasi penyakit, sistem peringatan dini, ketertelusuran pergerakan ternak, kapasitas laboratorium, pengawasan karantina, vaksinasi, serta kemampuan respon cepat terhadap wabah. Pemerintah Indonesia juga perlu memperluas jumlah dan jangkauan dokter hewan, paramedis veteriner, serta petugas kesehatan hewan di daerah. Penguatan kesehatan hewan tidak hanya penting untuk menjaga populasi sapi di Indonesia, tetapi juga menentukan keamanan dan keberlanjutan perdagangan kedua negara.

Terakhir, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data primer melalui wawancara, observasi lapangan, dan diskusi dengan pemerintah, pelaku industri, peserta program, serta kelompok peternak penerima manfaat. Pendekatan kuantitatif atau metode campuran juga dapat digunakan untuk mengukur pengaruh program terhadap produktivitas, populasi sapi, pendapatan peternak, tingkat adopsi teknologi, dan efisiensi usaha. Penelitian lanjutan dapat membandingkan antara wilayah penerima dan wilayah bukan penerima program atau mengkaji keberlanjutan hasil RMCP setelah 2024. Pendekatan tersebut diperlukan agar kontribusi RMCP dapat dinilai secara lebih terukur dan dapat dibedakan dari pengaruh kebijakan nasional maupun perubahan kondisi pasar.